

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ali, Mahruz. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana .
- Asikin, Zainal. 2016. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Chazawi, Adami. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ddjubaedah, Neng. 2011. *UU NO 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddyono, Widodo. 2014. *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Jakarta: Alfabeta.
- Julaiddin. 2019. *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban (Viktimologi)*. Padang: LPPM-UNES.
- Kenedi, John. 2020. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran.
- Koto, Ismali dan Faisal. 2022. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: Umsu Press.
- Mansur, Arief dan Elisatris Gultrom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan.: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Manda Maju.

- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sagala, Penus, dkk. 2021. *Hukum dan Cybercrime*. Yayasan Kita Menulis.
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspaces, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Sunantara, Untung, dkk. 2021. *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thoif, Mokh. 2021. *Tinjauan Yuridis Pendidikan NonFormal Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Veda, Avila. 2021. *Aspek Hukum Untuk Jerat Pelaku: Paduan Seri Kedua Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual*. Jakarta: SAFENet.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiartana. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Zainuddin, Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Dalam Jurnal:

- Adkiras, Fadillah. 2021. "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia". *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.6, Nomor 2 (hlm.377).
- Arawinda, Hita. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia". *Jurnal Yustika*, Vol. 24, Nomor 2 (hlm.78).
- Arisanti, Winny dan Rai Setiabudhi. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 Nomor 5 (hlm.13).
- Aurelie, Gabriella. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Kasus Kekerasan

Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19". Jurnal Studi Islam Gender dan Anak. Vol.17, Nomor 1 (hlm.41).

Christianto, Hawaiian. 2020. "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban *Revenge Porn* Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 32, Nomor 2 (hlm.182).

Clarisa, Hardiana. 2021. "Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online Di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi". Jurnal *Lex Renaissance*, Vol.6, Nomor 4 (hlm.752).

Djanggih, dan Ahmad. 2017. "*The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016)*". Jurnal Dinamika Hukum, Vol.17, Nomor 2 (hlm.152-157).

Faizah, dan Rifqi Hariri. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *Legal Protection of Revenge Porn Victims As an Online Gender-Based Violence According To Law Number 12 Of 2022 on Sexual Violence Crime*. Jurnal Hukum Lex Generali, Vol., Nomor 7 (hlm.521).

Ihsani. 2021. "Kekerasan Berbasis Gender dalam *Victim-Blaming* pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media *Online*". Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol.2, Nomor 1 (hlm.12).

Muhardi. 2004. Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol.20, Nomor 4 (hlm.490).

Prameswari, Deassy Jacomina, dkk. 2022. "Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. Journal PAMALI: *Pattimura Magister Law Review*, Vol.1, Nomor 1 (hlm.56).

Putra, Nugraha. 2015. "Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan *Cyberporn*". Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, Nomor 1 (hlm.7).

Rauf, Abdul dan Suryani, 2019. "Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik". Jurnal Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Vol. 8, Nomor 1 (hlm.90).

Rosenberg, Roni dan Dancig. 2022. "*Revenge Porn In Shadow Of In The Shadow Of The First Amendment*". *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*, Vol. 23 (hlm.42)

Salter, Michael dan Croft. 2015. "*Responding to revenge porn: Challenges to online legal impunity*." *New views on pornography: Sexuality, politics, and*

the law hlm.233-256.

Sari, Purnama. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)". Jurnal Magister Hukum Vol. 8, Nomor 1 (hlm.6-10)

Soleman, Noviyanti. 2021. "Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia". Jurnal Al-Wardah, Vol.15, Nomor 1 (hlm.51-52).

Surayda, Helen Intania. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam. Jurnal Ius Constituendum, Vol.2, Nomor 1 (hlm.27).

Surbakti, Eden dan Ali. 2021. "Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.51, Nomor 1 (hlm.153-154).

Sushanty, Rimbawan. 2019. "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik". Jurnal Gagasan Hukum, Vol.1, Nomor 1 (hlm.116).

Willihardi, Putri dan Eko. 2020. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia". Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Teknologi, Vol.1, Nomor 1 (hlm.322).

Artikel dalam Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. 2022. "*Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2022*". Tersedia pada: <https://bulelengkab.bps.go.id> ((di akses pada Senin, 3 Agustus 2022 Pukul 12.00 WITA).

Balitbang Perda Buleleng. 2021. "*Profil Kabupaten Buleleng*". Tersedia pada: <https://tarubali.baliprov.go.id> (diakses pada, Senin, 19 April 2022 Pukul 14.00 WITA).

Komnas Perempuan. 2021. "*Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*". Tersedia pada: <https://komnasperempuan.go.id> (di akses pada Senin, 19 April 2022 Pukul 14.00 WITA).

Polres Buleleng. 2022. "Visi dan Misi Polres Buleleng". Tersedia pada <https://resbuleleng.bali.polri.go.id> (di akses pada Senin, 3 Agustus 2022 Pukul 12.00 WITA).

Peraturan Perundang-Undangan

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959*).

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4843 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952*).

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419*).

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5602 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5603*).

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4928 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4928*).

Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4171*).

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (*Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Nomor 4168*)

Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 4714*)

Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor (*Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 478*).